

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ahdi Darmawan, *Jogja Bergolak dikursus Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik* Yogyakarta :Kepel Pres, 2010.

Ahdi Darmawan, *Jogja Bergolak dikursus Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik* Yogyakarta :Kepel Pres, 2010.

Akil Mochtar, *Bantuan Hukum sebagai hak konstitusi warga negara*, kalambu, Jakarta, 2009.

AP. Parlindungan, *Beberapa Masalah Dalam UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1*, Universitas Trisakti , Jakarta, 2016

Budi Utomo, , *Hukum Perdata*, Penerbit Sejahtera, Yogyakarta, 2013.

G. Kartasapoetra, , *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,2012

H.R.Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep – konsep hukum dalam pembangunan , Kumpulan Karya Tulis,Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M . Alumni*, Bandung,2006.

Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.

- Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*  
Yogyakarta: GadjahMada University Press, 1993.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia  
Indonesia, Jakarta, 1998.
- Saleh Wiramihardja, *Perspektif Sejarah Hukum Kewarganegaraan Indonesia*  
Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta.:2008.
- Seodikno Mertokusumo, *Hukum Dan Politik Hukum Agraria*, Universitas  
Terbuka, Jakarta, 1988.
- Seotopoawiro,Korniatmanto, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia Asal  
Usul dan Perkembangannya*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung,1994.
- Seotopoawiro,Korniatmanto, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia Asal  
Usul dan Perkembangannya*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung,1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja  
Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*,  
Rajawali Pers, Jakarta,2006.
- Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Unpas,  
Bandung2010.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak –hak atas Tanah*, Prenda Media,  
Jakarta, 2005.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Kencana Prenenda  
Media, Jakarta 2012.

## **B. Ketentuan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang –  
Undang Nomor 3 Jo No 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah  
Istimewa Yogyakarta.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok – Pokok  
Agraria.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik  
Indonesia.

Undang – Undang nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Ras dan  
etnik.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah  
Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan  
Sepenuhnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY.

Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas Tanah Di  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah DIY No.3 Tahun 1948 Tentang Pelaksanaan Berlaku  
Sepenuhnya.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY .

Instruksi Kepala Daerah DIY No.K898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Police  
Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.

### C. Sumber Lainnya

Dwiyansany, S., & Wardhani, 2019. SISTEM PERTANAHAN KERATON  
YOGYAKARTA SEBAGAI DAERAH OTONOMI KHUSUS. *Jurnal  
Pembangunan Hukum Indonesia, vo 1, No.2*

Wawancara dengan Bapak Bagia, S.H selaku Kepala Bagian Sengketa,  
Konflik, Perkara Pertanahan, BPN Kanwil DIY

<http://www.rudipradisetia.com/2010/06/konversi-hak-atas-tanah.html?m=1> di  
akses pada Kamis 15Nonember 2020 pukul 20.06

Sigar Aji Poernama, Status Hukum Tanah Kesultanan Yogyakarta,  
<https://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 15desember  
2021pada pukul 11.53

[.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e154165681a4/status-  
hukum-tanah-kasultanan-yogyakarta/#\\_ftn10](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e154165681a4/status-hukum-tanah-kasultanan-yogyakarta/#_ftn10), diakses pada jum'at 27  
Mater 2020.